

## BAB 6 : KESIMPULAN DAN SARAN

### 6.1 Kesimpulan

1. Kebijakan yang menjadi landasan pelaksanaan KLA bidang kesehatan khususnya pelayanan ramah anak sudah ada. Pembuatan kebijakan baru didasari oleh aturan dari pusat dan kebutuhan lapangan saja. Kebijakan sejauh ini sudah cukup dalam mendukung pelaksanaan KLA Bidang kesehatan terutama pada pelayanan ramah anak namun perlu terus di kembangkan.
2. Penanggungjawab dalam KLA bidang kesehatan adalah Dinas Kesehatan, secara spesifik oleh Bidang Kesehatan Masyarakat. Anggota tim lain bisa berubah setiap tahun. Belum semua petugas puskesmas yang sudah mendapatkan bimbingan teknis puskesmas ramah anak. Petugas kesehatan puskesmas yang ada belum mencukupi kebutuhan dari jumlah, terutama tenaga terlatih pelayanan ramah anak. Dan distribusi SDM yang tidak merata.
3. Dana KLA bidang kesehatan bersumber dari APBD langsung turun kepada SKPD terkait sesuai kegiatan yang akan dilakukannya dan dana Kapitasi Puskesmas. Anggaran yang di buat oleh DP3AP2KB lebih kearah operasional kegiatan KLA terutama pada rapat gugus tugas dan pelatihan yang berkaitan dengan KLA. Anggaran pada tahun 2017 belum mencukupi.
4. Di Kota Padang belum semua puskesmas memiliki sarana yang menunjang pelaksanaan pelayanan ramah anak. Baru 4 Puskesmas yang di tunjuk sebagai puskesmas ramah anak yang mempunyai sarana cukup lengkap. Penanggungjawab pengadaan sarana adalah Puskesmas dan Dinas Kesehatan. Anggaran yang terbatas menjadi factor utama kurangnya fasilitas.

5. Pelayanan ramah anak dikota padang belum memiliki SOP yang baku. Baru ada juknis tentang indikator pelayanan ramah anak. Pembentukan Gugus tugas KLA belum menggunakan SOP yang baku. Belum ada SOP pemantauan dan evaluasi.
6. Sudah ada data terpilah anak yang akan digunakan untuk mendukung KLA bidang Kesehatan. Data yang ada masih terpisah-pisah dan belum terintegrasi. Data bersumber dari puskesmas dan Dinas Kesehatan.
7. RAD disusun dalam rapat gugus tugas. Setahun sekali. Dasar penyusunan RAD adalah kebutuhan lapangan dan isu kesehatan yang sedang diangkat oleh pusat.
8. Pelayanan kesehatan anak di kota padang sudah cukup bagus namun belum merata diseluruh wilayah. SOP pelayanan ramah anak belum ada. Belum semua petugas yang melayani anak paham dengan KHA dan pelayanan ramah anak. Semua puskesmas sudah kawasan tanpa rokok. Belum semua program puskesmas yang bersinggungan dengan anak yang mencapai target. Puskesmas sudah menerima dan melayani anak dengan kasus korban kekerasan, kencanduan, dan anak hamil. Sanitasi puskesmas sudah baik. Data di puskesmas hanya sampai 7 tahun. Data di DKK data terpilah sesuai dengan program berjalan. SDM yang kurang dari segi kuantitas, pemerataan, dan keterampilan. Kemudian sarana atau fasilitas yang belum dimiliki semua puskesmas dalam pelayanan ramah anak. Lalu standar pelayanan ramah anak yang belum ada.

9. Belum ada teknis baku pemantauan pelayanan ramah anak. Pemantauan yang sudah pernah dilakukan dengan observasi menggunakan table ceklis. Pemantauan dilakukan 3 bulan sekali. Hasil rapat dibawa ke rapat gugus tugas. Kendalanya ada pada SDM yang belum paham secara utuh dengan KHA dan pelayanan ramah anak dan sarana transportasi serta biaya operasional yang masih terbatas.
10. Laporan di buat oleh DP3AP2KB dengan Menghimpun data dari gugus tugas yang dilakukan di akhir atau awal tahun berjalan. Laporan diserahkan kepada walikota, lalu ke tingkat provinsi dan ke Pusat.
11. Sudah ada kebijakan dari Pemko yaitu perda tentang perlindungan anak, perda kawasan tanpa rokok, keputusan kepala dinas kesehatan dan SK puskesmas ramah anak Sebagai dasar pelaksanaan pelayanan ramah anak untuk mendukung KLA. Belum bisa disimpulkan karena anggaran tahun 2018 tidak diketahui. Belum ada kebijakan yang mendapat masukan dari forum anak. Baru dilakukan Bimtek pada tahun 2017 dan belum ada pelatihan KHA. Data yang ada di puskesmas hanya sampai 7 tahun. Data anak di DKK terpilah pada masing-masing programnya. Dunia usaha belum dilibatkan pada tahun 2017. Belum semua program puskesmas yang bersinggungan dengan anak yang mencapai target. Sudah ada lembaga pemberi layanan PKPR. Puskemas sudah menerapkan kawasan tanpa rokok.

## 6.2 Saran

1. Saran kepada pemerintah agar dapat mengeluarkan pedoman KLA yang mengatur tentang teknis pelaksanaan KLA. Aturan tersebut berisi tentang aturan koordinasi lintas sektor antar dinas yang terkait dalam pelaksanaan KLA, teknis pengumpulan data dari instansi pelaksana hingga pengumpulannya dan seterusnya, sehingga memudahkan DP3AP2KB sebagai leading sektor dalam KLA ini dan juga akan memudahkan Pemko Padang dalam pelaksanaan KLA kedepannya.
2. Perlu juga pemerintah membuat standar operasional prosedur pelayanan ramah anak di puskesmas agar pelayanan yang didapatkan anak-anak di seluruh wilayah Kota Padang sama.
3. Pemerintah harusnya dapat membuat kebijakan tentang pengembangan dan pemberdayaan forum anak agar forum anak dapat dimanfaatkan dalam pembangunan salah satunya untuk memberi masukan ke kebijakan yang akan dikeluarkan pemerintah.
4. Disarankan kepada Pemerintah Kota Padang untuk membuat pedoman pelaksanaan KLA berupa Juknis hingga SOP, dari pelaksanaan secara umum hingga ke khusus seperti pada pelayanan ramah anak di Puskesmas.
5. Kekurangan SDM di Puskesmas dapat diatasi dengan peningkatan koordinasi lintas program di Puskesmas yang mempunyai sasaran sama yaitu anak. Agar dapat mengoptimalkan tenaga, dana, dan waktu dalam pelaksanaan program.
6. Perlu diadakan pelatihan kepada seluruh tenaga puskesmas tentang KHA terutama hak kesehatan dasar anak, dan pelatihan tentang standar pelayanan ramah anak, agar pelayanan ramah anak dapat berjalan lebih optimal.

7. Saran untuk peneliti selanjutnya untuk menghitung kebutuhan SDM di puskesmas dengan metode *Workload indicator staff need (WISN)* untuk tiap Poli khususnya KIA anak agar mencukupi kebutuhan SDM untuk melakukan pelayanan ramah anak.
8. Pemerintah perlu melengkapi sarana pelayanan ramah anak di semua Puskesmas di Kota Padang, agar semua anak di Kota Padang dapat merasakan pelayanan ramah anak.
9. Pemerintah perlu untuk meningkatkan anggaran operasional dalam pelaksanaan KLA agar penyusunan RAD, pemantauan dan evaluasi dapat berjalan lancar dan dapat dihadiri oleh tim gugus tugas secara lengkap.
10. Disarankan kepada DP3AP2KB agar membuat format khusus untuk pendataan kesehatan anak mulai dari usia 0-18 tahun agar memudahkan Puskesmas dan DKK dalam merekapitulasi data kesehatan anak, sehingga memudahkan Monev dan penilaian tiap tahunnya.

